

IMPLEMENTASI PROGRAM DANDAN OMAH UNTUK MEWUJUDKAN RUMAH LAYAK HUNI DI KOTA SURABAYA

Ivan Dwi Putra

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Ivanarkam123@gmail.com

Dida Rahmadanik

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
didarahma@untag-sby.ac.id

Adi Soesiantoro

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
adisusiantoro@untag-sby.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Dandan Omah Program initiated by the Surabaya City Government to provide decent housing for low-income communities. This program responds to the high poverty rate and the presence of slum areas in the city. The research employs a descriptive qualitative method using the policy implementation theory by Van Meter and Van Horn, which includes six key indicators: communication, resources, disposition, bureaucratic structure, social-political-economic environment, and policy standards and objectives. Data were collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the program's implementation is generally well-executed, supported by effective coordination among related agencies and community involvement through local technical groups. However, challenges remain, including budget constraints, bureaucratic complexity, and limited public awareness of program sustainability. Despite these obstacles, the program has significantly improved the quality of life for beneficiaries. Nevertheless, improvements in execution and evaluation are necessary to fully achieve the program's goals.

Keywords: *Dandan Omah, Decent Housing, Policy Implementation, Van Meter and Van Horn, Surabaya*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Dandan Omah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam upaya mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Program ini merupakan respons terhadap tingginya angka kemiskinan dan kawasan permukiman kumuh di Surabaya. Pendekatan penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang mencakup enam indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, lingkungan sosial, politik dan ekonomi, serta standar dan tujuan kebijakan. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa implementasi program berjalan cukup baik, didukung oleh koordinasi yang efektif antara dinas terkait dan masyarakat, serta keterlibatan kelompok teknis lokal. Namun, masih ditemukan kendala seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang kompleks, dan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keberlanjutan program. Program ini memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, namun diperlukan perbaikan dalam aspek pelaksanaan dan evaluasi agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: *Dandan Omah, Perumahan Layak, Implementasi Kebijakan, Van Meter dan Van Horn, Surabaya*

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Permasalahan kemiskinan dan ketimpangan sosial merupakan tantangan utama dalam pembangunan perkotaan, termasuk di Kota Surabaya. Salah satu manifestasi nyata dari kemiskinan adalah kondisi rumah tidak layak huni yang masih ditempati oleh banyak masyarakat berpenghasilan rendah. Rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan seperti sanitasi buruk, struktur bangunan yang rusak, serta ketiadaan akses air bersih menjadi faktor yang memperburuk kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Surabaya sebagai kota metropolitan mengalami laju urbanisasi yang tinggi, yang berdampak pada meningkatnya kawasan kumuh dan tekanan terhadap ketersediaan perumahan layak. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Provinsi Jawa Timur menjadi salah satu daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di Indonesia, dan Surabaya masih menghadapi tantangan dalam menata kawasan padat penduduk.

Menjawab kondisi tersebut, Pemerintah Kota Surabaya meluncurkan Program Dandan Omah sebagai solusi strategis untuk memperbaiki rumah-rumah tidak layak huni secara bertahap. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan bantuan fisik berupa renovasi rumah, tetapi juga memberdayakan masyarakat melalui pendekatan padat karya dan gotong royong. Pelaksanaannya melibatkan berbagai pihak, termasuk dinas teknis, kelurahan, kelompok teknis perbaikan rumah (KTPR), dan penerima manfaat secara langsung. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, program ini tidak lepas dari tantangan seperti keterbatasan anggaran, koordinasi antarinstansi, serta partisipasi masyarakat yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam untuk menilai sejauh mana implementasi program ini berjalan efektif dalam mewujudkan rumah layak huni di Kota Surabaya. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran komprehensif mengenai keberhasilan, hambatan, dan peluang perbaikan program ke depan. Secara administratif, Program Dandan Omah diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022. Tujuan utamanya adalah menciptakan rumah yang aman, sehat, dan layak huni sekaligus mendorong kemandirian warga dalam memperbaiki kondisi tempat tinggal mereka. Program ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada poin ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan

Artikel ini disusun untuk menganalisis implementasi Program Dandan Omah menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, yang meliputi enam indikator utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi, kondisi sosial-politik-ekonomi, serta standar dan tujuan kebijakan. Namun, dalam praktiknya, implementasi program ini masih menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan anggaran, inkonsistensi data penerima manfaat, serta kurangnya partisipasi aktif dari warga. Koordinasi antarinstansi juga menjadi perhatian, mengingat keberhasilan program sangat bergantung pada sinergi antara dinas teknis, pemerintah kelurahan, RT/RW, dan masyarakat penerima manfaat. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi terhadap implementasi program ini guna mengetahui sejauh mana efektivitasnya serta menemukan faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya.

B. LANDASAN TEORI

a) Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan keputusan atau tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk menjawab permasalahan tertentu dalam masyarakat. Menurut Dye (2002), kebijakan publik adalah "apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan". Dalam konteks ini, Program Dandan Omah merupakan bentuk intervensi kebijakan lokal yang bertujuan mengatasi masalah rumah tidak layak huni, yang merupakan manifestasi dari persoalan kemiskinan struktural dan ketimpangan akses terhadap tempat tinggal yang layak. Kebijakan ini dirancang dalam kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya pada tujuan ke-11 tentang kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan layak huni. Sebagai kebijakan publik, efektivitas implementasi Program Dandan Omah sangat bergantung pada proses pelaksanaan di tingkat birokrasi lokal serta partisipasi dari masyarakat.

b) Teori Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan, artikel ini menggunakan teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn (1975). Menurut mereka, implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok administratif guna mengimplementasikan tujuan dan sasaran kebijakan yang telah ditetapkan oleh keputusan politik Van Meter dan Van Horn mengemukakan enam variabel penting yang saling memengaruhi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

1. Standar dan Tujuan Kebijakan (Policy Standards and Objectives)

Tujuan kebijakan harus jelas, terukur, dan dapat dipahami oleh seluruh pelaksana kebijakan. Ketidakjelasan dalam rumusan tujuan akan menyebabkan perbedaan interpretasi yang berdampak pada pelaksanaan di lapangan. komponen utama yang menentukan arah implementasi sebuah kebijakan. Standar berfungsi sebagai pedoman atau tolok ukur dalam pelaksanaan kebijakan, sedangkan tujuan menggambarkan hasil yang ingin dicapai. Agar implementasi berjalan efektif, standar dan tujuan kebijakan harus jelas, terukur, realistis, dan dapat dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Ketidakjelasan atau ambiguitas dalam rumusan tujuan dapat menimbulkan interpretasi berbeda-beda di tingkat pelaksana, yang pada

akhirnya menghambat pencapaian hasil yang diinginkan. Dengan demikian, kejelasan dan konsistensi standar serta tujuan sangat penting untuk memastikan kebijakan dilaksanakan sesuai dengan maksud awalnya.

2. Sumber Daya (Resources)

Implementasi membutuhkan sumber daya yang mencakup anggaran, personel, informasi, dan infrastruktur pendukung. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara optimal. Sumber daya mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan. Terdapat beberapa elemen dalam mengimplementasikan kebijakan. Pertama, staf adalah sumber daya utama dalam implementasi kebijakan atau sumber daya manusia. Kedua, informasi dalam implementasi kebijakan mempunyai dua jenis, informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan dan informasi mengenai data kepatuhan dari pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga yaitu wewenang, pada umumnya wewenang harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam menjalankan kebijakan yang ditetapkan secara keputusan politik. Keempat, fasilitas adalah faktor penting, implementator mungkin memiliki jumlah staf yang mencukupi, mengerti tugas yang akan dijalankan. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tidak akan berjalan dengan baik

3. Komunikasi Antar Organisasi Pelaksana (Communication)

Efektivitas pelaksanaan kebijakan ditentukan oleh kejelasan komunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana di lapangan. Informasi harus disampaikan secara jelas, konsisten, dan dapat dipahami oleh semua pihak terkait. Komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Komunikasi diperlukan agar para pembuat keputusan dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat.

4. Disposisi atau Sikap Pelaksana (Disposition)

Sikap atau respon para pelaksana kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi. Ketika pelaksana memiliki komitmen dan kesediaan untuk menjalankan kebijakan, maka program akan berjalan lebih efektif. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Beberapa hal penting dalam disposisi adalah efek disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang sudah ditetapkan.

5. Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Struktur organisasi yang terlalu kompleks atau tidak efisien dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan. Diperlukan prosedur operasional yang jelas dan fleksibel agar pelaksanaan program berjalan efektif. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerja sama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang

tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumberdaya menjadi tidak efektif dan tidak termotivasi sehingga menghambat jalannya kebijakan. Dua karakteristik untuk mendorong kinerja struktur birokrasi adalah membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang lebih fleksibel.

6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik (External Environment)

Faktor eksternal seperti budaya masyarakat, dukungan politik, kondisi ekonomi lokal, dan keterlibatan stakeholders sangat memengaruhi konteks implementasi suatu kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn (1975), lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan variabel eksternal yang berpengaruh besar terhadap implementasi kebijakan. Lingkungan sosial mencakup nilai, norma, serta karakteristik masyarakat yang dapat mendukung atau menghambat kebijakan, seperti tingkat partisipasi dan kesadaran warga. Lingkungan ekonomi berkaitan dengan ketersediaan sumber daya finansial, baik dari pemerintah maupun kemampuan ekonomi masyarakat penerima manfaat. Sementara itu, lingkungan politik mencakup stabilitas dan dukungan dari aktor-aktor politik. Terhadap kebijakan yang dijalankan ketiga aspek ini, meskipun tidak dapat sepenuhnya dikendalikan, harus diperhatikan agar implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan.

Keterkaitan Teori dengan Program Dandan Omah

Penerapan teori Van Meter dan Van Horn dalam konteks Program Dandan Omah memberikan kerangka analitis untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan program. Komunikasi antarinstansi, kecukupan sumber daya, serta partisipasi warga sebagai pelaksana teknis lokal (KTPR) menjadi aspek utama dalam mengukur keberhasilan program. Di sisi lain, hambatan birokrasi, kondisi sosial-ekonomi penerima manfaat, dan ketepatan sasaran juga menjadi indikator penting dalam menilai sejauh mana program ini mampu menciptakan hunian layak bagi masyarakat miskin kota.

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai implementasi Program Dandan Omah dalam mewujudkan rumah layak huni di Kota Surabaya. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menelaah fenomena sosial secara mendalam dan kontekstual, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan publik pada tingkat lokal. Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada beberapa kelurahan yang menjadi titik pelaksanaan program, dengan mempertimbangkan keberadaan rumah tidak layak huni dan keterlibatan aktif dari aparat pemerintahan setempat serta masyarakat penerima manfaat. Fokus penelitian diarahkan pada analisis enam indikator implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, struktur birokrasi, kondisi sosial-ekonomi-politik, serta standar dan tujuan kebijakan. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci seperti pejabat Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), lurah, ketua RT/RW, kelompok teknis perbaikan rumah

(KTPR), serta warga penerima program. Selain itu, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati langsung proses renovasi rumah, interaksi antar pelaksana, dan dampak program terhadap kehidupan warga. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi, laporan pelaksanaan program, Peraturan Wali Kota Surabaya, dan data pendukung lain yang relevan.

Teknik analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang mencakup tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan untuk menyaring informasi penting, penyajian data disusun dalam narasi tematik berdasarkan indikator teori, dan kesimpulan ditarik secara induktif dengan mengacu pada pola-pola yang ditemukan. Untuk memastikan validitas dan reliabilitas data, digunakan teknik triangulasi baik dari sisi sumber maupun metode, dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan metode ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas implementasi Program Dandan Omah serta faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi keberhasilannya.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program Dandan Omah di Kota Surabaya berjalan cukup efektif dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian yang layak. Hal ini ditunjukkan melalui komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat, terutama melalui koordinasi antara DPRKPP, kelurahan, dan RT/RW, serta keterlibatan aktif warga dalam pelaksanaan program melalui Kelompok Teknis Perbaikan Rumah (KTPR). Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala yang menghambat, seperti keterbatasan anggaran, birokrasi yang lambat, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga keberlanjutan hasil perbaikan rumah. Analisis menggunakan model implementasi Van Meter dan Van Horn menunjukkan bahwa keberhasilan program dipengaruhi oleh kejelasan tujuan kebijakan, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi yang mendukung, serta lingkungan sosial-politik yang relatif stabil. Oleh karena itu, meskipun program ini membawa dampak positif, upaya peningkatan dalam koordinasi, pendanaan, dan edukasi masyarakat tetap diperlukan agar implementasi dapat berjalan lebih optimal dan berkelanjutan.

Implementasi Program Dandan Omah di Kota Surabaya menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan ini berjalan cukup efektif dalam mewujudkan rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah, meskipun masih dihadapkan pada berbagai tantangan struktural dan teknis. Berdasarkan data dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP), sejak diluncurkan pada tahun 2022 hingga 2024, program ini telah berhasil merenovasi lebih dari 2.000 unit rumah, meningkat signifikan dari capaian 842 unit pada 2021 dan 929 unit pada 2022. Program ini didesain untuk memberdayakan masyarakat melalui pendekatan padat karya, yang melibatkan kelompok teknis lokal (KTPR) dalam proses perbaikan rumah, sehingga selain meningkatkan kualitas hunian juga memberikan efek ekonomi langsung bagi warga sekitar. Dalam konteks komunikasi, hasil wawancara dengan Sekretaris

DPRKPP, Pak Arsyad, menunjukkan bahwa koordinasi antara dinas, kelurahan, dan RT/RW berjalan cukup intensif melalui sosialisasi langsung, pemasangan spanduk, hingga survei lapangan.

Hal ini diperkuat dengan testimoni warga yang menyatakan mereka mengetahui program ini melalui informasi dari kelurahan dan RT. Dari sisi sumber daya, tantangan muncul dalam bentuk keterbatasan anggaran yang membuat tidak semua rumah tidak layak huni dapat langsung ditangani. Meski demikian, strategi pemanfaatan tenaga kerja lokal dan pemangkasan prosedur menjadi solusi efektif untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dalam aspek disposisi, semangat gotong royong dan komitmen tinggi dari pelaksana menjadi kekuatan utama program, terlihat dari partisipasi warga dalam proses pengerjaan, mulai dari membongkar bagian rumah lama hingga membantu pembangunan fisik secara kolektif. Adapun struktur birokrasi masih menjadi kendala, terutama dalam hal verifikasi data penerima yang memakan waktu, serta kompleksitas prosedur administratif yang terkadang memperlambat distribusi bantuan material. Meskipun begitu, adanya integrasi program dengan data masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dari Dinas Sosial cukup membantu dalam menyaring calon penerima bantuan yang benar-benar layak. Dari sisi lingkungan sosial, politik, dan ekonomi, dukungan pemerintah kota sangat kuat, terlihat dari keterlibatan langsung wali kota dalam pencaangan dan pengawasan program, serta tidak adanya penolakan politik terhadap pelaksanaan kebijakan ini. Akan tetapi, masih ditemukan kendala seperti rendahnya kesadaran warga dalam menjaga dan merawat rumah yang telah diperbaiki.

Terakhir, dari aspek standar dan tujuan kebijakan, Program Dandan Omah memiliki indikator yang jelas, yakni perbaikan struktur rumah agar memenuhi standar kelayakan fisik, sanitasi, dan keamanan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 35 Tahun 2022. Data observasi lapangan menunjukkan bahwa rumah-rumah yang telah direnovasi memiliki perubahan signifikan, dari atap yang tadinya bocor menjadi baru, dinding yang sebelumnya retak diperbaiki, hingga penambahan fasilitas dasar seperti kamar mandi dan ventilasi sehat. Dari total informan yang diwawancarai, 90% menyatakan puas terhadap hasil program dan merasakan peningkatan kualitas hidup, terutama dari segi kenyamanan dan kesehatan lingkungan tempat tinggal. Secara keseluruhan, jika dianalisis dengan model Van Meter dan Van Horn, implementasi Program Dandan Omah telah memenuhi sebagian besar indikator keberhasilan kebijakan, meskipun masih memerlukan penyempurnaan dalam aspek birokrasi, penguatan data penerima manfaat, serta edukasi masyarakat terkait pentingnya keberlanjutan hasil program.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Program Dandan Omah di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan langkah konkret Pemerintah Kota Surabaya dalam menangani permasalahan rumah tidak layak huni, yang secara langsung berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Program ini

mengusung pendekatan gotong royong dan padat karya dengan melibatkan kelompok teknis masyarakat (KTPR) yang tidak hanya membantu dalam perbaikan rumah, tetapi juga mendorong partisipasi sosial serta meningkatkan pendapatan warga. Dalam penerapannya, jika dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, keenam indikator implementasi menunjukkan bahwa program telah berjalan cukup efektif.

Aspek komunikasi antaraktor, seperti dinas, kelurahan, dan RT/RW berjalan lancar dan menjadi kunci utama dalam menjangkau penerima manfaat secara tepat. Sumber daya, baik berupa tenaga kerja maupun anggaran, meskipun terbatas, dimaksimalkan melalui strategi pelibatan masyarakat dan skema padat karya. Disposisi atau sikap pelaksana juga menjadi kekuatan program ini, terlihat dari komitmen tinggi para pelaksana dan warga yang turut mendukung pelaksanaan program di tingkat lokal. Di sisi lain, struktur birokrasi masih menghadapi tantangan dalam hal prosedur yang kompleks dan waktu verifikasi data penerima yang cukup lama, meskipun upaya integrasi dengan database Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menjadi langkah yang positif. Lingkungan sosial, politik, dan ekonomi yang mendukung, terutama komitmen kuat dari Wali Kota Surabaya, juga menjadi faktor pendorong utama keberhasilan implementasi. Sementara itu, standar dan tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan jelas dan mampu dipahami oleh semua pelaksana, sehingga pelaksanaan program berjalan sesuai arahan kebijakan yang berlaku. Dampak program ini tidak hanya dirasakan secara fisik dalam bentuk rumah yang layak huni, tetapi juga secara sosial dan psikologis, di mana warga merasa lebih aman, sehat, dan sejahtera.

Saran

Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Program Dandan Omah ke depan, terdapat beberapa saran penting yang dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dan pemangku kebijakan terkait. Pertama, diperlukan peningkatan alokasi anggaran dan efisiensi distribusi bantuan agar jumlah rumah yang direnovasi dapat diperluas serta proses pelaksanaan tidak terhambat oleh keterlambatan logistik. Pemerintah juga dapat menjalin kemitraan dengan sektor swasta dan NGO untuk mendukung pembiayaan dan pelaksanaan program, melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) atau kolaborasi teknis.

Kedua, penyederhanaan birokrasi dan digitalisasi sistem pengajuan serta verifikasi penerima bantuan menjadi hal yang mendesak untuk mempercepat proses tanpa mengurangi akurasi dan ketepatan sasaran. Integrasi data antar instansi dan pemanfaatan teknologi informasi akan memperkecil potensi tumpang tindih atau keterlambatan dalam pelaksanaan.

Ketiga, perlu dilakukan pendampingan dan edukasi kepada warga penerima manfaat mengenai cara merawat rumah dan pentingnya menjaga hasil renovasi agar manfaat program berkelanjutan. Pelatihan keterampilan perbaikan rumah skala kecil juga dapat diberikan agar warga mampu melakukan pemeliharaan mandiri.

Keempat, Pemerintah Kota Surabaya disarankan untuk melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program, baik dari sisi teknis, dampak sosial, maupun persepsi masyarakat penerima. Evaluasi ini sebaiknya melibatkan akademisi,

LSM, serta tokoh masyarakat agar diperoleh masukan objektif dan representatif. Terakhir, penting untuk menjadikan Program Dandan Omah sebagai model kebijakan sosial perumahan yang dapat direplikasi di kota-kota lain dengan penyesuaian konteks lokal masing-masing. Dengan komitmen yang kuat, pengelolaan yang baik, serta dukungan penuh dari masyarakat, program ini berpotensi menjadi tonggak penting dalam mewujudkan keadilan sosial dan kualitas hidup yang layak bagi seluruh warga kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Area, Universitas Medan. 2019. "Implementasi Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Kurang Mampu Skripsi Oleh: Safi ' I Program Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area Medan Hilir Provinsi Riau Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk M."
- Gunadi, Beni, Nenden Kostini, And Mohammad Benny Alexandri. 2023. "Evaluasi Kebijakan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Di Kota Cimahi Tahun 2020." *Responsive* 5(4):321.
- Kebijakan Program Bantuan Rumah Layak Huni Untuk Masyarakat Miskin Di Kecamatan Long Kali, Implementasi And Anisa Ismi. 2021. "Policy Implementation Of Assistance Program For Decent House For Poor Communities In Long Kali District."
- Pampur, Flavianus, Ika Devy Pramudiana, And Sri Kamariyah. 2024. "Implementasi Program Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Melalui E-Rutilahu Bagi Keluarga Miskin (Gamis) Oleh Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Serta Pertanahan Kota Surabaya." *Sap* 2(1):93–104.
- Rahmah, Wedia And Wahyu Subadi. 2021. "Implementasi Program Rumah Tidak Layak Huni (P-Rtlh) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Desa Pamarangan Kiwa Kecamatan Tanjung Kabupaten Tabalong." *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik Dan Administrasi Bisnis* 4(1):258–70.
- Sri Kasiemi. 2019. "Evaluasi Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Bojonegoro." *Jurnal Ilmiah Administrasi Negara Universitas Bojonegoro* 3(2):32–37.
- Syaputra, Doni Aprianto, Dibyana Galih Prakasita, Cindy Aulia, Desiree Roring, And Faskan Aditama. 2021. "Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni Untuk Pengentasan Kemiskinan." *Jurnal Kommunity Online* 1(2):92–110.